

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung, 2010. [Peranan Dan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja Dalam Penyusunan Apbd](#). Jurnal Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Pelalawan. Riau.
- Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers
- Arista Widiyanti, 2017. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa*. Studi Pada Desa Kandung Dan Sumberejo Di Kecamatan Winogan Kabupaten Pasuruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.
- Badoa M. D., Gene H. M. Kapantow, Dan Eyverson Ruauw, 2018. Faktor–Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon. *Agri-Sosioekonomi Unsrat*, Issn 1907– 4298, Volume 14 Nomor 2, Mei 2018 : 195 – 204.
- Diniyanto, Ayon., 2019. Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi Dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8 No. 3, Desember 2019 Hlm. 351–365.
- Eko, Trigus Dan Sri Rahayu, 2012. Perubahan Penggunaan Lahan Dan Kesesuaiannya Terhadap Rdtr Di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*. Volume 8 (4): 330-340 Desember 2012.
- Fitrianingsih, Eka., 2017. Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (Permukiman) Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar, Hlm 15-16.

- Hossaimah Dan Slamet Subari, 2017. “Percepatan Alih Fungsi Lahan (Konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, Vol.1, No. 2, Hlm 8.
- Ikbal Hidayat, 2018. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Skripsi. Stpm. Yogyakarta.
- I Wayan Irfan M, 2017. *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)*. Universitas Lampung, Lampung.
- Jamaludin, Nasrullah, Adon. 2015. *Sosiologi Perdesaan*, Bandung : Cv Pustaka Setia.
- Jannah, Rifatul., Bambang Trisetoyo Eddy, Dan Tutik Dalmiyatun, 2017. “Analisis Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak”, *Agrisociconomics*, Vol. 1, No. 1 (2017), Hlm 2.
- Juhadi, 2007. “Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan” *Jurnal Geografi*, Vol. 4 No. 1 (2007).
- Kamaluddin, 2016. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar.
- Lantaeda, S. B., Florence D. J. L., Dan Joorie M. R., 2017. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik* Volume 04 No. 048.

Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.

Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Miftahuddin, 2018, Dengan Judul “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Panggugarjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*”.
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Mustopa Didjaja, 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.

Nasrul Haq, 2019. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Skripsi. Fisip. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. 2016. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Dana Desa Pasal 1 Ayat 2

Ritohardoyo, Su. 2009. *Pemanfaatan Lahan Hutan Rakyat Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk : Kasus Di Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. Disertasi, Sekolah Pascasarjana Ugm, Yogyakarta.

Roza, D. Dan Laurensius Arliman S., 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomer 3 Tahun 2017. Padjadjaran. [Issn 2460-1543] [E-Issn 2442-9325].

Simamora, Indra., 2018. *Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pelita Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli-Tengah*. Skripsi. Fisip. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suliyanto, Dimas., 2020. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Negeri Senduro Kabupaten Lumajang*. Skripsi. Stie Widya Gama Lumajang.

Supriadi Jaya Abadi, 2018. *Peranan Badan Permusyaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*. Skripsi. Fisip. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Jakarta: Publikasi Scholar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 55.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 77 Ayat 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 371.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Pasal 1 Ayat (21)

Utomo M, Dkk. 1992. *Pembangunan Dan Alih Fungsi Lahan*, Universitas Lampung, Lampung.

Widiastutiningrum, Eva, 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang, Semarang

Wiguna, Y. T., Rosmala D., Dan Nina A., 2019. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, 6 (2): 41-52. Issn 2085-0328.

Yalti, Meisy Egi., 2020. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.